

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

PPID Pembantu pada

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Tengah

Tahun 2023

DAFTAR ISI

HALAMAN	JUDUL	1
DAFTAR 1	5I	2
BAB I	PENDAHULUAN	3
	A. Latar Belakang	3
	B. Maksud dan Tujuan	3
	C. Landasan Hukum	3
	D. Sistematika Laporan	4
BAB II	GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN UMUM PELAYANAN INFORMASI DOKUMENTASI PUBLIK	
	A. Struktur Organisasi PPID Pembantu	6
	B. Tugas dan Fungsi PPID Pembantu	6
	C. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik	7
	D. Jadwal Pelayanan Informasi Publik	7
BAB III	GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DOKUMENTASI PUBLIK	
	A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik	· 8
	B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Dokumentasi Publik beserta Kualifikasinya	
	C. Anggaran Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik serta Lapo Penggunaannya	
BAB IV	RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK	10
	A. Jumlah Permohonan Informasi Publik	10
	B. Jangka Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi Publik der Klasifikasi Tertentu	_
	C. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan	11
	D. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Ditolak beserta Alasanny	ya 16
BAB V	RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	17
	A. Jumlah Keberatan yang Diterima	17
	B. Tanggapan atas Keberatan yang Diberikan dan Pelaksanaannya	17
	C. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Adjudikasi Komisi Informasi	
BAB VI	KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYA	NAN
	INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK	18
BAB VII	REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKAT KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	KAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 F menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ("UU 14/2018") memberikan jaminan bagi semua orang untuk memperoleh informasi. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.

Keberadaan UU 14/2018 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan pengaturan hak dan kewajiban para pemangku kepentingan serta teknis penyelenggaraan pelayanan informasi publik.

B. Maksud dan Tujuan

Sebagai salah satu badan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ("DPMPTSP") memiliki kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan DPMPTSP untuk masyarakat luas.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi, DPMPTSP diharapkan bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan publik yang sebaik-baiknya, yang selanjutnya dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka, sebagai upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menciptakan suatu kepemerintahan yang baik.

C. Landasan Hukum

Landasan hukum penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkup DPMPTSP adalah sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
- 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
- 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik,
- 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik,
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah,
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah,
- 9. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah,
- 10. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 188.44/12/S.V/DPMPTSP-2021 tanggal 10 Maret 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 188.44/03/S.V/DPMPTSP-2022 Tanggal 7 Januari 2022 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah.

D. Sistematika Laporan

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

HALAMAN JUDUL

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Landasan Hukum
- D. Sistematika Laporan

BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

- A. Struktur Organisasi PPID Pembantu
- B. Tugas dan Fungsi PPID Pembantu
- C. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik
- D. Jadwal Pelayanan Informasi Publik

BAB III GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

- A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik [yang dimiliki beserta kondisinya]
- B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik beserta Kualifikasinya
- C. Anggaran Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik serta Laporan Penggunaannya

BAB IV RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

- A. Jumlah Permohonan Informasi Publik
- B. Jangka Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi Publik dengan Klasifikasi Tertentu
- C. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan
- D. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Ditolak beserta Alasannya

BAB V RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

- A. Jumlah Keberatan yang Diterima
- B. Tanggapan atas Keberatan yang Diberikan dan Pelaksanaannya
- C. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengjeta ke Komisi Informasi
- D. Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Adjudikasi Komisi Informasi

BAB VI KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

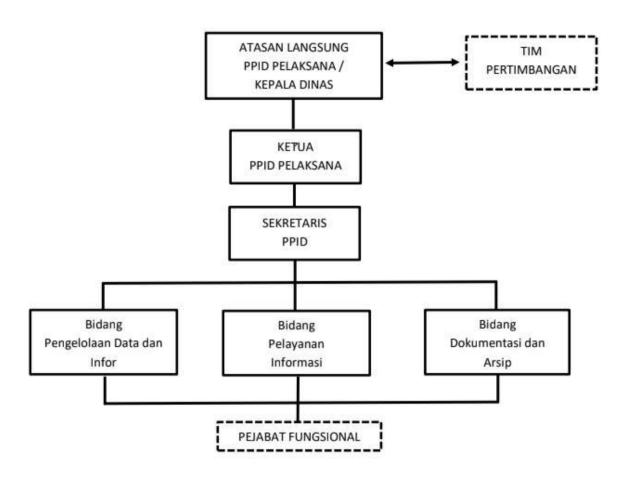
BAB VII REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI



DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Struktur Organisasi PPID Pembantu

Struktur organisasi PPID Pembantu pada DPMPTSP menurut Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 800/064/Bid.I/Diskominfo tanggal 16 Januari 2023 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, digambarkan dengan bagan sebagai berikut:



B. Tugas dan Fungsi PPID Pembantu

Tugas dan fungsi PPID Pembantu menurut menurut Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 800/064/Bid.I/Diskominfo tanggal 16 Januari 2023 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, adalah sebagai berikut:

- 1. Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Perangkat Daerah;
- 2. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik pada Perangkat Daerah;
- 3. Merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, mengawasi dan mengavaluasi pelaksanaan kegiatann pengelolaan dan layanan informasi publik di Perangkat Daerah;
- 4. Melakukaan Koordinasi dengan unit kerja terkait bidang layanan, pengelolaan informasi publik serta bidang dokumentasi dan arsip;
- 5. Melakukan Koordinasi dengan PPID Utama Provinsi Kalimantan Tengah, terkait pelaksanaan Uji Konsekuesi terhadap informasi yang dikecualikan.

C. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik

Standar operasional prosedur dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik adalah sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu	Output				
1	Pemohon menyampaikan permohonan informasi, baik secara langsung atau tidak	15 menit	Formulir permohonan informasi publik yang dilampiri fotokopi identitas.				
	langsung.						
2	Bidang Pendukung Sekretariat PLID	15 menit	1. Berkas permohonan				
	melakukan registrasi berkas permohonan		2. Nota dinas				
	informasi publik setelah dilaksanakan						
	penelitian terhadap subjek dan objek						
	permohonan.						
3	PPID Pembantu memberikan disposisi atas	15 menit	1. Berkas permohonan				
	permohonan informasi publik.		2. Nota dinas				
4	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	10 hari	Informasi atau dokumentasi yang				
	memberikan informasi atau dokumen yang	kerja	diminta oleh Pemohon Informasi				
	diminta oleh pemohon atau tanggapan lain						
	sesuai dengan ketentuan yang berlaku.						
5	Pemohon menerima informasi atau dokumen	15 menit	Tanda terima				
	yang diminta oleh pemohon atau tanggapan						
	lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.						
6	Bidang Pendukung Sekretariat PLID	15 menit	Arsip PPID				
	mengarsipkan informasi atau dokumen yang						
	diminta oleh pemohon atau tanggapan lain						
	sesuai dengan ketentuan yang berlaku.						

D. Jadwal Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik dilaksanakan setiap hari kerja, yakni:

1. Senin s.d. Kamis	Pukul 09.00 – 15.00 WIB
Istirahat	Pukul 12.00 – 13.00 WIB
2. Jumat	Pukul 09.00 – 15.00 WIB
Istirahat	Pukul 11.00 – 13.00 WIB





GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

Desk Informasi Publik untuk saat ini masih tergabung dengan loket Pelayanan Informasi dan Pengaduan pada Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yang dilengkapi dengan meja dan kursi bagi petugas dan pemohon, lemari arsip, dan formulir pendaftaran.

DPMPTSP menyediakan saluran lain bagi masyarakat untuk mengakses informasi publik, antara lain: (1) telepon, pada nomor (0536) 3231414, (2) faksimile, pada nomor (0536) 3231454, (3) pos elektronik, pada alamat ptsp.kalteng@gmail.com.

Selain berperan serta aktif dalam portal ppid.kalteng.go.id, DPMPTSP juga sedang mengembangkan portal resmi yang memiliki alamat http://dpmptsp.kalteng.go.id. Portal resmi ini berisi tentang berbagai informasi terkait layanan dan hal lain yang diperlukan oleh masyarakat, termasuk di dalamnya sub-menu terkait PPID.

B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik beserta Kualifikasinya

Pelayanan informasi publik pada PPID Pembantu DPMPTSP melibatkan beberapa personil lintas bidang karena penguasaan informasi publik ada pada setiap bidang.

No.	Jabatan PPID	Jabatan Instansi							
1	Pengarah / Atasan PPID	Kepala DPMPTSP							
2	Tim Pertimbangan	- Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan							
		Penanaman Modal							
		- Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu							
		- Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian							
		Penanaman Modal							
		- Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal							
3	PPID Pembantu:								
	a.Ketua	- Sekretaris DPMPTSP							
	b.Sekretaris	- Esther Mutiara L. Tobing, S.Hut., M.Si							
4	Bidang-bidang								
	i. Bidang Pengelolaan	- Petra J. Birim, S.E., M.Si.							
	Data dan Informasi - Vuji Ervina, S.STP., M.IP.								
		- Sylvana Anethe, S.T., M.T.							
- Debby Selvyanti, S.T., M.T									

	- Enny Milida, A.Md
ii. Bidang Pelayanan	- Citra Wisdaria, S.Hut
Informasi	- John Deddy Pariatno, S.T
	- Arun Totok Wibowo, S.T., M.Ling
	- Eka Desinta, S.S
	- Gersom L. Panjaitan, S.S
iii. Bidang Dokumentasi	- Kasubbag Umum dan Kepegawaian
dan Arsip	- Kasubbag Keuangan dan Aset
	- Yulian Wiratno, S.Sos., MAP.
	- Nanik Triastuti, S.Kom
	- Desi Noor Linda, A.Md. Kom.

C. Anggaran Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik serta Laporan Penggunaannya

Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik pada DPMPTSP belum didukung oleh anggaran rutin karena belum ada dasar hukum di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terkait penganggaran kegiatan terkait. Namun, agar penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik pada DPMPTSP tetap berjalan, maka ditunjang dari anggaran rutin melalui APBD Tahun Anggaran berjalan sesuai kebutuhan, termasuk dalam penyediaan sarana dan prasarana layanan informasi dan dokumentasi publik serta pelaporannya.



A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

No	Bulan		Jumlah	
		Pemberian	Penolakan	Proses
1	Januari	1	-	-
2	Februari	7	-	-
3	Maret	8	-	-
4	April	2	-	-
5	Mei	2	-	-
6	Juni	5	-	-
7	Juli	2	-	-
8	Agustus	5	-	-
9	September	3	-	-
10	Oktober	2	-	-
11	November	1	_	_
12	Desember	0	-	-
	TOTAL	38	-	-

B. Jangka Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi Publik dengan Klasifikasi Tertentu

No	Pemohon Informasi (Nama/Alamat/No Reg)	Permintaan Informasi	Jumlah Permintaa n	Je	enis	Info	orma	asi	Status				Tanggal		nggal Wakt	
				В	SM	SS	DK	AP	Р	PRS	Т	BD	Minta	Jawab	Jam	Mnt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Bambang Irawan (Dewan Pimpinan Pusat Forum Pemuda Dayak) Jl. RTA. Milono Km. 4 Perum Citra Mandiri No. 15 Palangka Raya 001/PIP-PPID- NP/II/DPMPTSP-2023	- Permohonan data Perusahaan Bongkar Muat (PBM) di Kalimantan Tengah	1					1	1				31	10		
2	Rilaltu Pinehas Silam Jl. G. Obos VII, RT. 007, RW. 012, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya 002/PIP-PPID-NP /II/DPMPTSP-2023	- Informasi Data Perizinan a.n. CV. Putra Tasik	1					1	1				07	08		
3	H. Gandi Jl. A. Yani Komplek PDAM Palangka Raya 003/PIP-PPID-NP /II/DPMPTSP-2023	- Daftar Perusahaan Galian C yang Resmi yang Memiliki Izin Se- Kalimantan Tengah	1					1	1				23	20		

4	Thomas Segah (Biro Pemerintahan dan OTDA Setda Provinsi Kalimantan Tengah) 004/PIP-PPID-NP /VII/DPMPTSP-2023	- Data Izin Lokasi (KKPR) yang Diterbitkan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022	1			1	1		27	09	
5	Eduardus Satrio (PT. Indoraj Arsip Multiguna) Jl. RTA. Milono Nomor 1 Palangka Raya 005/PIP-PPID-NP /IX/DPMPTSP-2023	- Dataset pembuatan satu data prov kalteng (terlampir)	1	1			1		12	05	
6	Achmad Saleh Suhada (Greenpeace) Jl. HOS Cokrominoto No.19 RT 1/RW 1 Gondangdia, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, 10350 006/PIP-PPID-NP /IX/DPMPTSP-2023	- Data dan Informasi Peta Sebaran Perkebunan Provinsi Kalteng	1			1	1		11	13	
7	Kartika Sari (Ketua Progress Kalimantan Tengah) Jl. G. Obos 19B, Jl. Mutiara Ujung Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya Palangka Raya 007/PIP-PPID- NP/VI/DPMPTSP-2023	- Data dan Informasi Eksisting Arahan Lokasi, Izin Lokasi, Izin Usaha Perkebunan, Izin Pelepasan Kawasan Hutan, Sertifikat Hak Guna Usaha untuk PT. Wana Sawit Subur Lestari 2 (Ex PT. KUCC) dan PT. Salonok Ladang Mas				1			7	13	
8	Jhanson Regalino (Program Manajer The Borneo Orangutan Survival Foundation) Jl. Tantina No. 67A RT 02, RW V Palangka Raya 008/PIP-PPID- NP/VI/DPMPTSP-2023	- Data Izin PBPH di wilayah Kec. Mantangai Kab. Kapuas dan Kec. Dusun Hilir Kab. Barito Selatan				1			7	10	

Keterangan:

B = Berkala P = Penuhi SM = Serta Merta PRS = Proses SS = Setiap Saat T = Tolak

DK = Dikecualikan BD = Belum Didokumentasikan

AP = Atas Permintaan

C. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan

No	Tanggal	Nama Pemohon	Alamat/No.Telp	Pekerjaan	Informasi yg Diminta	Tujuan Permohonan	Informasi/ Data Yang Diberikan
1	31/01/2023	Bambang Irawan (Dewan Pimpinan Pusat Forum Pemuda	Jl. RTA. Milono Km. 4 Perum Citra Mandiri No. 15 Palangka Raya 82226231111	Wiraswasta	Permohonan data Perusahaan Bongkar Muat (PBM) di Kalimantan Tengah	Untuk menjalin kerja sama dengan Perusahaan Bongkar Muat (PBM)	Surat balasan beserta lampiran

		Dayak)					
2	07/02/2023	Rilaltu Pinehas Silam	Jl. G. Obos VII, RT. 007, RW. 012, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya '0811520091	Wiraswasta	Informasi Data Perizinan a.n. CV. Putra Tasik	Untuk mengetahui secara jelas dan terang apakah wilayah yang dimaksud sudah memiliki Izin Galian Pasir & Urug atau belum	Surat balasan
3	23/02/2023	H. Gandi	Jl. A. Yani Komplek PDAM Palangka Raya '081345171990	Wartawan	Daftar Perusahaan Galian C yang Resmi yang Memiliki Izin Se- Kalimantan Tengah	Agar para wartawan ikut serta memantau kegiatan Pertambangan	Surat balasan beserta lampiran
4	27/07/2023	Thomas Segah	Biro Pemerintahan dan OTDA Setda Provinsi Kalimantan Tengah '081250944418	PNS	Data Izin Lokasi (KKPR) yang Diterbitkan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022	Melengkapi Dokumen Pendukung IKK LPPD untuk Bahan Ecvaluasi oleh Timnas 2023	Surat balasan beserta lampiran
5	12/09/2023	Eduardus Satrio (PT. Indoraj Arsip Multiguna)	Jl. Titan Asri III/CC 41 Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur	Swasta	Dataset pembuatan satu data prov kalteng (terlampir)	Dataset pembuatan satu data prov kalteng	Surat balasan
6	11/09/2023	Achmad Saleh Suhada (Greenpeac e)	JI. HOS Cokrominoto No.19 RT 1/RW 1 Gondangdia, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, 10350 '0811-7539-734 / 0811-8040-814	Swasta	Permohonan Data dan Informasi Peta Sebaran Perkebunan Provinsi Kalteng	Melengkapi data dan informasi dalam kepentingan riset dan pengawasan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tata kelola sektor kehutanan dan sumber daya alam yang lebih baik	Surat balasan beserta lampiran
7	07/06/2023	Kartika Sari (Ketua Progress Kalimantan Tengah)	Jl. G. Obos 19B, Jl. Mutiara Ujung Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya Palangka Raya '081251330634, 081258028820	Ketua Progress Kalimantan Tengah	Data dan Informasi Eksisting Arahan Lokasi, Izin Lokasi, Izin Usaha Perkebunan, Izin Pelepasan Kawasan Hutan, Sertifikat Hak Guna Usaha untuk PT. Wana Sawit Subur Lestari 2 (Ex PT. KUCC) dan PT. Salonok Ladang Mas	Sebagai bahan kajian dalam membuat analisis terkait Perkebunan yang ada di Kalimantan Tengah	Surat balasan

8	07/06/2023	Jhanson Regalino (Program Manajer The Borneo Orangutan Survival Foundation)	Jl. Tantina No. 67A RT 02, RW V Palangka Raya	Program Manajer The Borneo Orangutan Survival Foundation	Data Izin PBPH di wilayah Kec. Mantangai Kab. Kapuas dan Kec. Dusun Hilir Kab. Barito Selatan	mendukung penyusunan rencana program kegiatan lingkup YBOS- Program Konservasi Mawas Kalteng	Surat balasan
9	03/01/2023	Magfur Deputi Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Kalteng	Jl. Diponegoro No. 11 Palangka Raya 73111 (0536)322250, 3222007	Deputi Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Kalteng	Permohonan Informasi Data Penanaman Modal Periode TW IV 2022	Dalam rangka pengumpulan data dan informasi kondisi perekonomian terkini sebagai bahan penyusun Laporan Perekonomian Provinsi (LPP)	Surat balasan beserta lampiran
10	19/01/2023	Eko Marsono (Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah)	Jl. Kapten Piere Tendean No. 6 Palangka Raya (0536)3228105	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah	Data Perusahaan Pertambangan, Penggalian dan Energi	Mengetahui karakteristik perusahaan, antara lain identitas perusahaan, jumlah tenaga kerja, balas jasa pekerja, nilai produksi dan pendapatan	Surat balasan beserta lampiran
11	30/01/2023	Ir. H. Kamaludin, M.Si (Kepala DPMPTSP Kab. Kotawaringi n Barat)	Jl. Sutan Syahrir N0. 2B Pangkalan Bun (0536) 28064	Kepala DPMPTSP Kab. Kotawaring in Barat	Pemuktahiran Data Tambang	Keperluan pemutakhiran data sektor energi dan sumber daya mineral Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi mineral bukan logam dan batuan	Surat balasan beserta lampiran
12	30/01/2023	Ir. Leonard S. Ampung, MM., MT (Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah)	Jl. RTA Milono Nomor 01 Palangka Raya (0536) 3221716	Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Permintaan Data dari Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	Penilaian Kepatuhan Tahun 2023	Surat balasan beserta lampiran
13	30/01/2023	Drs. H. Djainuddin Noor, M.A.P (Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan)	Jl. A. Yani No. 01 Kuala Pembuang (0538) 222111, 22212	Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan	Permintaan Data IUP, Izin Ketenagalistrikan dan izin Air Tanah	Optimalisasi penerimaan pajak daerah tahun anggaran 2023 di Kabupaten Seruyan	Surat balasan beserta lampiran

14	20/02/2023	M. Yogiantoro, AK., CA., ACPA., CFrA (Ketua Tim Pemeriksa BPK RI)	Jl. Yos Sudarso No. 16 Palangka Raya	Ketua Tim Pemeriksa BPK RI	Permintaan Data perusahaan yang memiliki izin pemanfaatan air permukaan, perusahaan yang sedang proses mengajukan izin pemanfaatan air permukaan, perusahaan yang memiliki izin pemanfaatan air bawah tanah dan perusahaan yang sedang proses mengajukan izin pemanfaatan air bawah tanah	Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya	Surat balasan beserta lampiran
15	23/02/2023	Mira Diyanti, SE., MM (Kepala UPT-PPD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jkalimantan Tengah di Kuala Kapuas)	Jl. Tambun Bungai No. 24 Kuala Kapuas (0513) 21333	(Kepala UPT-PPD Badan Pendapata n Daerah Provinsi Jkalimanta n Tengah di Kuala Kapuas	Data Perusahaan di Kab. Kapuas yang memiliki Izin Penggunaan Air Permukaan	Agar pelayanan pembayaran pajak air permukaan dapat berjalan dengan lancar	Surat balasan beserta lampiran
16	01/03/2023	Norita Indayanie, SE., M.A.P (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau)	Jl. Bukit Hibukl Timur No. 074 Nanga Bulik (0532) 20171013	Kepala Badan Pengelolaa n Keuangan dan Pendapata n Daerah Kabupaten Lamandau	Data Perusahaan Penyelenggaraa n Ketenagalistrikan Non PLN di Kabupaten Lamandau	Sebagai dasar untuk dilakukan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN dan MBLB atas izin/pertimban gan teknis yang dikeluarkan di wilayah Kabupaten Lamandau	Surat balasan beserta lampiran
17	03/03/2023	Andi Murji Machfud, SH., M.H (Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya)	Jl. Diponegoro No. 13 Palangka Raya	Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya	Data Jumlah Perusahaan Berbadan Hukum yang beroperasi di Kota Palangka Raya	Sebagai bahan penyusunan Bank Data Intelejen Kejaksaan Negeri Palangka Raya	Surat balasan beserta lampiran
18	27/02/2023	Drs. Fajrurrahma n, MM (Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringi n Timur)	Jl. Jend. Sudirman No. 01 Sampit (0531) 21006,21007,21023 ,21050, 21083,21300,21301 ,21316)	Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaring in Timur	Data Air Bawah Tanah di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur	Sebagai bahan penunjang dan monitoring sinkronisasi data perizinan air bawah tanah di Kabupaten Kotawaringin Timur	Surat balasan beserta lampiran
19	13/03/2023	Ernawati, S.Kom., M.Si (Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Murung	Jl. Letjend. Soeprapto Kantor Satu atap Lantai II Puruk Cahu (0528) 32825	Kepala Badan Pendapata n Daerah Kabupaten Murung Raya	Data Izin Uaha Pertambangan di Kabupaten Murung Raya	Sebagai dasar untuk melakukan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Surat balasan beserta lampiran

		Raya)					
		raya)					
20	03/03/2023	Tarmizi (Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah)	Jl. Lambung Mangkurat No 21 Banjarmasin (0511) 3351072, 3351073	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah	Permintaaan Data Perizinan	Dalam rangka perluasan basis pajak di wilayah Kalimantan Tengah	Surat balasan beserta lampiran
21	28/03/2023	M. Yogiantoro, Ak., CA., ACPA, CFrA (Ketua Tim Pemeriksa BPK RI)	Jl. Yos Sudarso No. 16 Palangka Raya (0536) 3241118	Ketua Tim Pemeriksa BPK RI	Data Izin Galian C dan Izin Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiridi Wilayah Prov. Kalimantan Tengah	Melaksanakan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022 di Palangka Raya	Surat balasan beserta lampiran
22	28/03/2023	Putirta, SE., M.Si (Plt. Kepala UPTPPD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Kasongan)	JI. Tjilik Riwut m. 1,5 Kasongan (0536) 4041240	Plt. Kepala UPTPPD Badan Pendapata n Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Kasongan	Data Investor Sektor 3P di Wilayah Kabupaten Katingan	Optimalisasi dan Pengamanan Terget Pendapatan Asli Daerah	Surat balasan beserta lampiran
23	29/03/2023	Ferry Hardi, ST., MT (Asisten Perekonomi an dan Pembangun an SETDA Kab. Murung Raya)	Jl. Letjend Suprapto No. 1 Puruk Cahu (0528) 31001	Asisten Perekonomi an dan Pembangu nan SETDA Kab. Murung Raya	Data Prizinan SIPB dan Izin Mineral Bukan Logam dan Batuan di wilayah Kab. Murung Raya	Sebagai data penyedia material yang bersumber dari hasi galian/tamban g di Kabupaten Murung Raya	Surat balasan beserta lampiran
24	02/05/2023	Magfur (Deputi Kepala Perwakilan Kantor Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah)	Jl. Diponegoro No. 11 Palangka Raya 73111 (0536)322250, 3222007	Deputi Kepala Perwakilan Kantor Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah	Informsi Data Penanaman Modal Triwulan I 2022	Sebagai bahan penyusunan Laporan Perekonomian Provinsi (LPP)	Surat balasan beserta lampiran
25	25/05/2023	Hang Perkasa, ST., CSCU (Ketua Tim Pemeriksaa n BPK RI di Kasongan)	Jl. Yos Sudarso No. 16 Palangka Raya (0536) 3241118	Ketua Tim Pemeriksaa n BPK RI	Data Surat Izin Pengushaan Air Tanah (SIPA)	Melaksanakan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2022	Surat balasan beserta lampiran
26	07/06/2023	Hari Utomo (Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaha raan Provinsi Kalimantan	Jl. Tjilik Riwut Km. 1 Palangka Raya (0536) 3221215	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaha raan Provinsi Kalimantan Tengah	Data Investasi daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Sebagai bahan Penyusunan kajian/analisis pada periode Triwulan II Tahun 2023	Surat balasan beserta lampiran

		Tengah)					
		,					
27	06/06/2023	Drs. H. Fajrurrahma n, MM (Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawringin Timur)	Jl. Jend. Sudirman No. 01 Sampit (0531) 21006, 21007, 21023, 21050, 21083, 21300, 21301, 21316	Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawringi n Timur	Data IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan di wilayah Kab. Kotawaringin Timur	Sebagai bahan pengambilan kebijakan dan monitoring pajak kegiatan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batguan di Kab. Kotawaringin Timur	Surat balasan beserta lampiran
28	17/06/2023	Hari Utomo (Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaha raan Provinsi Kalimantan Tengah)	Jl. Tjilik Riwut Km. 1 Palangka Raya (0536) 3221215	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendah araan Provinsi Kalimantan Tengah	Dukungan Data Investasi Daerah Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah berupa perdagangan karbon dan lahan gambut	Sebagai data lanjutan terkait beberapa sektor investasi di Provinsi Kalimantan Tengah	Surat balasan beserta lampiran
29	19/05/2023	Farid Hidayat, ST., MT (Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementeria n ATR/BPN)	Jl. Raden Patah I No. 1 Jakarta Selatan '021-7264112	Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementeria n ATR/BPN	Informasi Data Izin Pemanfaatan Ruang	Untuk mewujudkan single database dan memitigasi terjadinya tumpang tindih antara Izin Pemanfaatan Ruang (yang terbit sebelum UUCK) dengan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	Surat balasan beserta lampiran
30	29/05/2023	Drs. Nuryakin, M.Si (Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah)	Jl. RTA. Milono No. 1 Palangka Raya (0536) 3221538	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Data Eksternal dalam Rangka Survey Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2023	Sebagai bahan untuk pelaksanaan Kegiatan Survei Penilaian Integritas Tahun 2023 si Pemerintah Provinsi Kalteng	Surat balasan beserta lampiran
31	21/07/2023	Endy, ST., MT (Kepala Bidang Litbang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembanga n Prov. Kalimantan Tengah)	(0536)32221645	Kepala Bidang Litbang Badan Perencanaa n Pembangu nan Daerah Penelitian dan Pengemba ngan Prov. Kalimantan Tengah	Data NIB dan Investasi di Daerah	untuk melengkapi data yang akan disampaikan ke Kemendagri	Surat balasan beserta lampiran

32	20/07/2023	Eko Marsono (Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah)	Jl. Kapten Piere Tendean No. 6 Palangka Raya (0536) 3228105	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah	Data Dukung ST2023 berupa Data NIB Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum di Prov. Kalimantan Tengah dan Data kepemilikan Sertifikasi Pelaksanaan Kegiatan Usaha (SNI ISO dsb)	Sebagai data pendukung kegiatan pencacahan lengkap Sensus Pertanian 2023	Surat balasan beserta lampiran
33	24/07/2023	Noni Waty, S.S., M.Si (Kepala UPT- PPD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Kuala Kurun)	Jl. K.S. Tubun Kuala Kurun (0537) 3032830	Kepala UPT-PPD Badan Pendapata n Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Kuala Kurun	Data Izin Pemanfaatan Air Permukaan di wilayah Kabupaten Gunung Mas	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Daerah Khususnya Pajak Air Permukaan	Surat balasan beserta lampiran
34	01/08/2023	Ramadhansya h, SE., Mec.Dev (Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur)	Jl. Jenderal Achmad Yani No. 14 Sampit (0531) 31666	Kepala Badan Pendapata n Daerah Kabupaten Kotawaring in Timur	Data Sebaran Penggunaan Air Tanah yang Memiliki Izin di Wilayah Kab. Kotawaringin Timur	Untuk memenuhi keperluan data Peta Tematik pada Simpul Jaringan	Surat balasan beserta lampiran
35	01/08/2023	Magfur (Asisten Direktur Deputi Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Kalteng)	Jl. Diponegoro No. 11 Palangka Raya 73111 (0536)322250, 3222007	Asisten Direktur Deputi Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Kalteng	Informasi Data Penanaman Modal Triwulan II 2023	Sebagai bahan penyusunan Laporan Perekonomian Provinsi (LPP)	Surat balasan beserta lampiran
36	10/07/2023	Tarmizi (Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah)	Jl. Lambung Mangkurat No 21 Banjarmasin (0511) 3351072	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah	Data Izin Usaha di Bidang Perambangan Mineral dan Batubara, Data Usaha dan Perizinan Sektor Kehutanan, Data Usaha dan Perizinan Sektor Pemanfaatan Sumber Daya Air, Data Usaha dan Perizinan Sektor Peternakan, dan Sektor Peternakan, dan Surat Iizn Usaha Jasa Pengurusan Transportasi dan Laporan Kegiatan Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi	Dalam rangka tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022	Surat balasan beserta lampiran
37	15/09/2023	Ernawati, S.Kom., M.Si (Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya)	Jl. Letjend. Soeprapto Kantor Satu atap Lantai II Puruk Cahu (0528) 32825	Kepala Badan Pendapata n Daerah Kabupaten Murung Raya	Data IUPTLS di Wilayah Kabupaten Murung Raya		Surat balasan beserta lampiran

38	23/10/2023	Ramadhansya	Jl. Jend A. Yani	Kepala	Data dan	identifikasi	Surat
		h, SE.,	No. 14 Sampit	Badan	Informsi Surat	dan	balasan
		Mec.Dev		Pendapata	Iizn	pendataan	beserta
		(Kepala	(0531) 31666	n Daerah	Penambanan	perusahaan	lampiran
		Badan	, ,	Kabupaten	Batguan (SIPB)	yang	
		Pendapatan		Kotawaring	di Kab. Kotim	melakukan	
		Daerah		in Timur		kegiatan	
		Kabupaten				usaha di Kab.	
		Kotawaringin				Kotim untuk	
		Timur)				dapat di	
		',				daftarkan	
						sebagai wajib	
						pajak di Badan	
						Pendapatan	
						Daerah Kab.	
						Kotim	

D. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Ditolak beserta Alasannya

No	Tanggal	Nama Pemohon	Alamat/No.Telp	Pekerjaan	Informasi yg Diminta	Tujuan Permohonan	Informasi/Dat a Yang Diberikan
-	-	-	-	-	-	-	-



A. Jumlah Keberatan yang Diterima

No	Tanggal	Nama Pemohon	Alamat/No.Telp	Pekerjaan	Informasi yg Diminta	Tujuan Permohonan	Alasan Keberatan
				NIHIL -	-		

B. Tanggapan atas Keberatan yang Diberikan dan Pelaksanaannya

No	Bulan	Jumlah Keberatan	Tanggapan At Keb	Pelaksanaan Tanggapan Atasan	
			Menerima	Menolak	PPID
1	Januari				
2	Februari				
3	Maret				
4	April				
5	Mei				
6	Juni		NTI	HIL	
7	Juli		141	116	
8	Agustus				
9	September				
10	Oktober				
11	November				
12	Desember				
	TOTAL				

C. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi dan Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Adjudikasi Komisi Informasi

No	Bulan		Sengketa ke Komisi formasi	Status Putusan Komisi Informasi		
		Mediasi	Adjudikasi Non Litigasi	Menguatkan Atasan PPID	Menguatkan Pemohon Informasi	
1	Januari					
2	Februari					
3	Maret			<u> </u>		
4	April		NIH	TL		
5	Mei					
6	Juni					
7	Juli					
8	Agustus					
9	September					
10	Oktober					
11	November					
12	Desember					
	TOTAL					

BAB VI KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi publik pada DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat beberapa kendala yang menjadi perhatian.

Pertama, proses pelembagaan PPID Pembantu belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik oleh seluruh aparatur DPMPTSP.

Kedua, pelaksanaan tugas PPID Pembantu belum didukung dengan anggaran sehingga fungsi PPID Pembantu belum berjalan secara optimal. Ketiadaan dukungan anggaran disebabkan oleh belum adanya dasar hukum terkait hal tersebut.

Selain itu, hal yang patut menjadi perhatian adalah inkonsistensi Tim Asesor PPID dalam melaksanakan penilaian kinerja PPID. Tim Asesor PPID dipandang belum melakukan penilaian kinerja secara terbuka.

BAB VII

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah sebagai berikut:

- 1. Dilaksanakan sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara menyeluruh dan berkesinambungan kepada aparatur DPMPTSP.
- 2. Asistensi berkesinambungan untuk peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia pengelola layanan informasi.
- 3. Mengusulkan dukungan anggaran terkait pelaksanaan tugas dan fungsi PPID Pembantu pada DPMPTSP.
- 4. Penilaian kinerja PPID dilakukan secara terbuka dan objektif.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Pembantu DPMPTSP.

Sekretaris Dinas

selaku Ketua PPID Pembantu,

Sukarno, SH, M.A.P.

NIP 19670717 198909 1 002

Palangka Raya, 01 Maret 2023

Sekretaris PPID Pembantu,

Esther M.L. Tobing, S.Hut., M.Si.

NIP 19791124 199903 2 003

Mengetahui:

Kepala Dinas,



